



'Sapa Aruh' Sri Sultan HB X

Ketahanan Warga Dibangun dari RT/Dusun

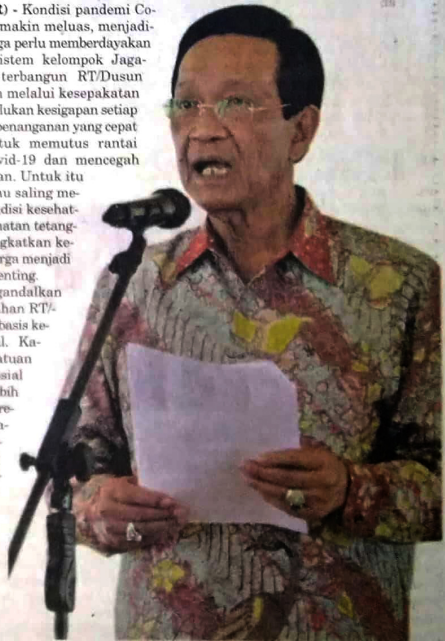
YOGYA (KR) - Kondisi pandemi Covid-19 yang semakin meluas, menjadikan setiap warga perlu memberdayakan diri dengan sistem kelompok Jaga Warga, agar terbangun RT/Dusun Siaga-Tangguh melalui kesepakatan bersama. Diperlukan kesigapan setiap warga dengan penanganan yang cepat dan tepat untuk memutus rantai penularan Covid-19 dan mencegah jatuhnya korban. Untuk itu 'Sapa Aruh' atau saling menyapa atas kondisi kesehatan dan keselamatan tetangga guna meningkatkan kesiapsiagaan warga menjadi sesuatu yang penting.

"Saya mengandalkan pada ketangguhan RT/Dusun sebagai basis ketahanan sosial. Karena sebagai satuan komunitas sosial terkecil akan lebih sederhana dan relatif mudah dalam pelaksanaannya. Saya anggap komunitasnya masih berpegang pada kearifan lokal sebagai dasar tindakan. Untuk itu, hiduppkanlah terus tenggang

* Bersambung

hal 7 kol 1

Sultan HB X menyampaikan Sapa Aruh 'Jaga Warga'.



KR (Fot Nufus)

Ketahanan

Sambungan hal 1

tenggang rasa antar tetangga dengan kemauan siap berbagi atas dasar 'Peduli-lindungi'. Sapa-Aruh dengan saling menyapa atas kondisi kesehatan dan keselamatan tetangga untuk meningkatkan kesiap-siagaan warga," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat menyampaikan 'Sapa-Aruh' bertajuk 'Jaga Warga Membangun Ketahanan Warga dari RT/Dusun' di Bangsal Kepatihan, Selasa (9/2).

Sultan menegaskan, meski vaksinasi tengah berjalan, masyarakat harus tetap taat aturan khususnya yang berkaitan penegakkan Prokes. Karena selama ini yang sering terabaikan adalah jaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan hanya keluar rumah jika memang perlu. Tentunya implementasi penerapan protokol kesehatan itu juga menuntut kesadaran pribadi masyarakat. "Memakai masker bukan karena takut didenda, jaga jarak bukan karena menghindari teguran, dan cuci tangan bukan karena disuruh, tapi sebagai upaya jangan tertular Covid-19," ungkap Sultan.

Menurut Sultan, dalam kondisi

seperti sekarang, cara terbaik untuk memerangi penyebaran Covid-19 adalah berdiam diri di rumah. Mengingat rumah adalah madrasah, tempat belajar hidup dan berkreasi guna menimba kehidupan yang lebih baik dalam situasi berbeda, keadaan baru dengan segala kesahajaannya. Sementara di sisi lain, pendayagunaan sumber daya juga menjadi satu hal yang tak boleh luput untuk diperhatikan. Untuk itu dirinya berharap seluruh otoritas terkait bersatu padu memerangi Covid-19. "Beberapa cara yang dapat dilakukan misalnya rekrutmen tenaga kesehatan, pemanfaatan sumber dana, alih fungsi hotel untuk isolasi mandiri, dan menggunakan teknologi tepat guna berbiaya murah seperti GeNose temuan UGM. Hidupkanlah guyub rukun dengan mengedepankan semangat gotong-royong dalam menghadapi Covid-19 serta berbagai dampaknya," tegas Sultan.

Tak hanya keterlibatan masyarakat, Sri Sultan memandang adanya partisipasi birokrat dan akademisi dapat melahirkan kolaborasi yang baik dalam pencegahan Covid-19. Adapun ben-

tuknya dengan hidupkan birokrasi yang melayani, akademisi yang inovatif, serta masyarakat yang peduli, melindungi, dan berbagi.

"Sinergi dan peran dari berbagai pihak yang disertai kesadaran masyarakat untuk saling peduli satu sama lain, merupakan langkah yang baik untuk bersama memerangi Covid-19. Karena jalan terbaik untuk meraih masa depan adalah melangkahkan kaki sejak hari ini sebagai pandoring laku (petunjuk jalan)," imbuh Sri Sultan.

Sementara itu Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan kebijakan pelaksanaan PPKM berbasis mikro di DIY memang mendadak sampai di desa, sebab baru berkomunikasi dengan perangkat yang ada di kabupaten/kota sehari sebelum penerapan. Selanjutnya kabupaten harus meneruskan kebijakan tersebut ke desa, sehingga dari sisi waktu agak mendadak. "Jadi wajar apabila ada desa-desa yang belum mempersiapkan posko sebagai bentuk implementasi Jaga warga di lapangan, kita beri waktu dan sangat memakluminya. Tetapi kami minta secepatnya karena PPKM

berbasis mikro ini waktunya kan hanya dua minggu," katanya.

Baskara Aji menjelaskan tempat posko Jaga Warga tersebut tidak harus dibangun, namun bisa memanfaatkan tempat yang sudah ada semisal pos ronda. Sehingga tidak harus membangun baru karena biayanya tidak sedikit dan membutuhkan waktu untuk proses pembangunannya serta belum tentu digunakan seterusnya. Selain posko, ada laporan berjenjang terkait zonasi pengendalian wilayah mulai dari tingkat RT/RW ke posko penanganan Covid-19 yang ada di Desa/Kalurahan.

"Semisal RT tersebut masuk Zona Merah, Zona Kuning dan sebagainya, merekalah yang menentukan karena mereka sendiri yang tahu kondisi di lingkungan RT/RW-nya masing-masing. Jika tidak ada rumah yang kasus positif dan suspek berarti masuk Zona Hijau, merekalah yang menentukan lalu dilaporkan ke Desa/Kalurahan yang juga akan merekap laporan di tingkat RT lalu akan menjadi Zonasi di tingkat Kabupaten/Kota lalu disimpulkan menjadi Zona Provinsi," jelasnya. (Ria/Ira)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. BPBD			
4. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005